

IMPLEMENTASI PENANGANAN STUNTING DI DESA OELAMI KECAMATAN BIKOMI SELATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Antonia Trisilva Siki¹, Fidelis Atanus², Yoakim Rembu³
Universitas Timor, Kefamenanu antoniatrivasiki@gmail.com
Universitas Timor, Kefamenanu atanusf@gmail.com
Universitas Timor, Kefamenanu s2yoakimrembu@gmail.com

ABSTRAK

Stunting adalah kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umunya (yang seusia). Menurut *World Organization Health* stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh kembang pada anak akibat infeksi berulang dan kurangnya gizi pada 1000 hari pertama kehidupan dalam hidup seorang anak yang didasarkan pada Panjang badan dibanding umur atau tinggi badan dibanding umur. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penanganan stunting di Desa Oelami yang didasarkan pada teori implementasi Ripley dan Franklin dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian adalah kepatuhan, lancar pelaksana rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi penanganan stunting di Desa Oelami memberikan manfaat bagi pemerintah desa, petugas kesehatan dan masyarakat untuk melakukan pencegahan penanganan stunting pada anak yang masih dalam kandungan. penanganan stunting ini didasarkan pada regulasi yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk dijalankan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah desa wajib berkolaborasi dengan petugas kesehatan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat akan perlunya hidup sehat sehingga menjamin tumbuh kembang anak karena salah satu fokus pemerintah saat ini adalah melakukan pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak di desa oelami dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai fisik yang siap untuk belajar.

Kata kunci: *Implementasi, Stunting, Pemerintah*

ABSTRACT

Stunting is a condition where a person's height is shorter than the height of other people in general (of the same age). According to the World Organization Health, stunting is a condition of failure to grow and develop in children due to repeated infections and lack of nutrition in the first 1000 days of a child's life which is based on body length compared to age or height compared to age. The aim of the research is to describe the implementation of stunting handling policies in Oelami Village which is based on Ripley and Franklin's implementation theory and uses qualitative research methods. The focus of the research is compliance, smooth implementation of routine functions and the realization of the desired performance and impact. The research results concluded that the implementation of stunting management in Oelami Village provides benefits for the village government, health workers and the community to prevent stunting management in children who are still in the womb. Handling stunting is based on regulations provided by the central government to be implemented by regional governments. Thus, the village government is obliged to collaborate with health workers to give confidence to the community in the need for healthy living so as to ensure children's growth and development because one of the government's current focuses is preventing stunting. This effort aims to ensure that children in Oelami village can grow and develop optimally and maximally while being physically ready to learn.

Keywords: *Implementation, Stunting, Government*

PENDAHULUAN

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir, kondisi stunting baru terlihat setelah bayi berusia dua tahun. Stunting menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Tahun 2020 tentang Penanganan Stunting berupa status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) dalam standar penelitian gizi dan anak, dengan hasil pengukuran yang berada pada nilai standar. Masalah gizi stunting pada balita dapat menghambat perkembangan anak, dengan dampak negatif yang berlangsung dengan kehidupan selanjutnya seperti penurunan intelektual, rentan terhadap penyakit yang tidak menular penurunan produktivitas hingga menyebabkan kemiskinan dan resiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan fokus mengatasi persoalan kekerdilan pada anak (stunting) dan kemiskinan. Persoalan kekerdilan telah menjadi beban pemerintah NTT sehingga perlu dilakukan berbagai intervensi program guna mengatasinya dan pengatasan kemiskinan. Persoalan kemiskinan dan kekerdilan masih banyak dialami warga. Stunting di NTT bukan hanya kesehatan dan kekurangan gizi tapi juga karena kesulitan mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan pola asuh yang salah turut menyumbang tingginya angka prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur.

Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) merupakan salah satu kabupaten di provinsi NTT yang memiliki angka stunting tertinggi. Penyebab tidak lain karena faktor gizi yang sangat kurang dan masih banyak ibu-ibu yang saat hamil kurang mendapatkan asupan gizi baik sehingga melahirkan anak postur tubuh yang kerdil. Bagi ibu hamil sangat diharapkan agar mereka mendapatkan kebutuhan gizi yang sesuai dengan kondisi kehamilannya agar bayi yang dilahirkan nantinya tidak menjadi stunting. Ibu hamil harus mendapatkan makanan tambahan suplementasi kalsium dan tidak boleh lupa untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Semua ibu menyusui bayinya karena setiap bayi 0-6 bulan berhak atas ASI eksklusif dan dilanjutkan hingga usia 2 tahun dengan ditambahkan makanan pendamping ASI.

Desa Oelami merupakan salah satu desa di Kabupaten Timor Tengah Utara yang terdaftar sebagai desa penyumbang angka stunting. Berdasarkan laporan Hasil Pemantauan Status Gizi (*Stunting, Wasting, Underweight*) tahun 2022 terdapat 55 anak masuk dalam kategori stunting di desa Oelami atau menyumbang 28,9% (Sumber: laporan Hasil Pemantauan Status Gizi Kab. TTU, 2022).

Bayi penderita stunting Desa Oelami perlu mendapatkan pendampingan dikarenakan masyarakat belum bisa secara mandiri. Problem seperti ini perlu penanganan khusus dan harus dilakukan sejak dini. Stunting tidak dapat disembuhkan secara langsung tetapi dilakukan secara bertahap sehingga mampu menurunkan resiko stunting pada generasi yang akan datang. Proses pendampingan pemerintah kecamatan tim

penggerak PKK dan Pemerintah Desa Oelami, tim Kader posyandu Desa Oelami dan pihak terkait diharapkan dapat mengubah pola hidup masyarakat sehingga jumlah penderita stunting di Kecamatan Bikomi Selatan khususnya Desa Oelami boleh turun.

Pemerintah telah meluncurkan rencana aksi nasional penanganan stunting pada tahun 2020 yang harus menekankan pada konvergensi ditingkat desa untuk memprioritaskan dengan kegiatan intervensi gizi spesifik dan gizi dan gizi sensitif dalam 1000 hari pertama (HPK) dengan kontribusi penurunan stunting pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan sedangkan intervensi gizi ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan terhadap penurunan angka stunting pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Sedangkan intervensi gizi sensitif ditunjukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan terhadap penurunan angka stunting dengan sasaran masyarakat umum dan tidak khusus terhadap ibu hamil dan balita pada 1000 hari pertama kehidupan. Pencegahan dan penanggulangan stunting membutuhkan upaya yang bersifat saling terintegritas

Tabel 1.1

Data stunting di desa Oelami 2022

No.	Kelompok posyandu	Jumlah anak stunting	Jumlah ibu hamil
1	Oelami	15	4
2	Beba	19	5
3	Bioni	20	4
Total		54	13

Sumber: Data stunting Desa Oelami 2022

Dari tabel 1.1 dijelaskan bahwa jumlah balita di kelompok posyandu Oelami bejumlah 15 anak dengan penderita stunting dan 4 ibu hamil. Sedangkan di kelompok posyandu Beba Jumlah 19 anak penderita stunting dan 5 ibu hamil lebih banyak dibandingkan dengan kelompok posyandu Oelami dan kelompok posyandu Bioni memiliki 20 anak penderita stunting dan 4 ibu hamil, banyak ini tentunya menjadi peringatan besar bagi pemerintah, dinas kesehatan maupun keluarga bayi tersebut karena stunting di Kabupaten TTU terlebih di Kecamatan Bikomi Selatan khususnya desa Oelami yang menjadi obyek penelitian penulis bukan lagi menjadi masalah keluarga si penderita tetapi sudah menjadi masalah bersama yang harus di atasi dan di cegah.

TINJAUAN PUSTAKA

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016:128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Sedangkan Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan.

Dalam studi implementasi kebijakan terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh

para ahli yang melihat variabel apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi suatu kebijakan publik.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Dalam penelitian ini, ketiga perspektif itu dipakai sebagai pedoman untuk mengukur keberhasilan implementasi program kemitraan. Hal ini dikarenakan ketiga perspektif tersebut tidak kontradiksi satu dengan yang lain, bahkan mereka saling melengkapi sehingga ketiga perspektif tersebut lebih holistic, oleh karenanya cocok dengan penelitian ini.

Ripley dan Franklin (1986; 12) yang mengedepankan 3 perspektif dipakai yang digunakan sebagai pedoman untuk mengukur keberhasilan implementasi yakni (a) Tingkat kepatuhan. Perspektif pertama (*compliance perspective*) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program. (b) Lancar pelaksanaan rutinitas fungsi. Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi. (c) Terwujudnya kinerja dan dampak yang impresif. Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu

dan mengarah pada implementasi/pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki.

Pendapat Ripley dan Franklin diatas menunjukkan bahwa keberhasilan suatu implementasi akan ditentukan bagaimana tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi lembaga, dan hasil kebijakan yang sesuai dengan rencana dari kebijakan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan didukung data kualitatif, dimana peneliti ini berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi. Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi penanganan stunting teori Ripley dan Franklin (1986; 12) yang mengedepankan 3 aspek yakni (a)Tingkat kepatuhan; (b) Lancar pelaksanaan rutinitas fungsi; (c)Terwujudnya kinerja dan dampak yang impresif. Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman (1992:16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan. Mengenai ketiga alur tersebut secara lengkapnya adalah sebagai berikut (a) Reduksi data (b) Penyajian data (c) Penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan

kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.

Kebijakan pada dasarnya lahir sebagai Solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi dalam kelompok Masyarakat. Stunting menjadi masalah yang sangat fenomenal sehingga membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pemangku kepentingan dalam usaha menekan laju pertumbuhannya.

Kejadian stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara perlu mendapat perhatian khusus, karena Kabupaten TTU sendiri menempati posisi kedua dengan prevalensi tertinggi setelah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang berarti taat, suka menurut perintah. Kepatuhan (*Obedience*) adalah suatu tindakan, perbuatan atau perubahan sikap dan tingkah laku seseorang untuk menerima, mematuhi, dan mengikuti permintaan atau perintah orang lain dengan penuh kesadaran. Kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk apapun selama individu menunjukkan sikap dan tingkah laku taat terhadap sesuatu atas seseorang misalnya kepatuhan terhadap aturan. Kepatuhan merupakan suatu kondisi yang tercipta dan berbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan, seperti: kesetiaan, keteraturan dan

keterbitan. Kepatuhan berhubungan dengan prestise seseorang dimata orang lain. Selain itu kepatuhan juga berkaitan dengan power terhadap penegakkan peraturan. Dimana peraturan adalah sesuatu yang mengandung kata-kata perintah dan larangan, serta apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta tidak sedikit pun yang mengandung paksaan. Menurut Rahwati (2015), kepatuhan adalah sikap disiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang ditetapkan, dengan penuh kesadaran.

Dari definisi diatas apabila dihubungkan dengan hasil penelitian maka, kepatuhan yang dilakukan oleh pemeritah desa dengan petugas kesehatan terhadap masyarakat di Desa Oelami Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengan Kepatuhan atau aturan dalam hal ini atasan (pemerintah desa) memberikan perintah kepada masyarakat untuk bekerjasama mencegah stunting yang saat ini terjadi di Desa Oelami. Kepatuhan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan petugas kesehatan adalah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang budaya hidup sehat dan memberikan pengenalan stunting kepada masyarakat, stunting dalam hal ini stunting pada anak adalah perawakan pendek yang merupakan gangguan pertumbuhan yang sebagian besar disebabkan karena masalah nutrisi. Secara sederhana stunting dapat dikatakan sebagai pengerdilan. Hal ini merujuk kepada kondisi gagal pertumbuhan pada anak yang menyebabkan mereka tidak memiliki tubuh proposional sebagai mestinya. Pada umumnya stunting terjadi pada

balita berusia 1-3 tahun. Pada rentang usia tersebut, ibu sudah bisa melihat apakah si kecil terkena stunting atau tidak. Meski baru dikenali setelah lahir, ternyata stunting berlangsung sejak si kecil masih berada di dalam kandungan setelah mengetahui stunting pada anak, penting bagi ibu untuk melakukan cara mencegah stunting pada anak. 1000 hari pertama kehidupan (HPK) sang anak memegang peranan penting dalam menentukan perkembangan anak selanjutnya, seribu hari pertama ini dihitung semenjak janin hingga anak berusia 2 tahun. serta petugas kesehatan memberikan solusi pencegahan dalam hal ini: selama hamil, ibu memang harus makan lebih banyak sekaligus lebih bergizi supaya janin dalam kandungan turut mendapatkan nutrisi untuk tumbuh kembangnya, rutin melakukan control kandungan kebidan atau dokter kandungan untuk mengetahui tumbuh kembang janin, mengonsumsi suplemen penambah darah dan asam folat, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada bayi, dan memberikan susu pertumbuhan untuk anak.

Lancar pelaksanaan rutinitas fungsi

Keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin dapat dilihat dari aspek kelancaran rutinitas dan terdapat hambatan atau masalah yang muncul. Implementasi berhasil dilaksanakan ketika seluruh kegiatan atau rutinitas berjalan dengan lancar. Dengan kelancaran pelaksanaan implementasi kebijakan dapat menentukan arah yang benar sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai koridor sehingga hasil yang dicapai sesuai perencanaan. Kelancaran dapat

juga diartikan sebagai hal yang tidak tersendat-sendat, aktivitas yang lancar maka mendapatkan pengertian yang positif karena dengan kelancaran maka bermuara pada tujuan yang hendak dicapai.

Dari definisi diatas apabila dihubungkan dengan hasil penelitian maka, lancar pelaksanaan kegiatan rutinitas fungsi berkaitan dengan peran dan fungsi pemerintah desa, perangkat desa, dan petugas kesehatan berusaha melakukan pencegahan penanganan stunting di Desa Oelami. Peran dan fungsi ini sudah berjalan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat akan tetapi Salah satu kendala dalam penanganan stunting di desa Oelami adalah minimnya anggaran. Saat ini pemerintah desa menggunakan dana anggaran dana desa (ADD) atau swadaya dari anggota-anggota atau para kader-kader dalam proses penanganan stunting. Karena belum ada kode desa maka pencairan dana pun terhambat. Setelah berjalannya program stunting tersebut dana untuk program stunting hanya 10 juta dari dana anggaran dana desa. Ada 54 anak balita yang termasuk dalam program stunting tersebut dan dihitung perorang mendapatkan Rp.15.000 perhari dan dana tersebut juga tidak cukup sehingga petugas kesehatan juga turut membantu. Seharusnya program stunting ini berjalan setiap hari hanya karena kurangnya anggaran dana desa, kurangnya partisipasi dari orang tua, maka jadwalnya diubah menjadi setiap bulan dan diadakan pada saat posyandu.

Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Kinerja berkaitan dengan prestasi yang telah dihasilkan dengan sesuai

standar yang ada atau yang telah ditetapkan, dan telah memberikan kepuasan kepada pihak yang terlibat. Adanya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan. keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan persepektif proses implementasi dan perspektif hasil. Perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Perspektif hasil program dapat dinilai berhasil ketika program dapat membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan atau sebaliknya.

Dari definisi diatas dapat dihubungkan dengan hasil penelitian yang terjadi di Desa Oelami berkaitan dengan pencegahan penanganan stunting ini sudah terwujud dengan cara mensosialisasikan dengan pendekatan dengan orang tua dan mengadakan pemberian makanan tambahan (PMT) serta bekerjasama dengan lintas sector desa, RT, dan kader-kader. Meskipun kurangnya minim pemahaman atau pengetahuan tentang masalah stunting yang saat ini terjadi akan tetapi pemerintah desa dan petugas kesehatan bersedia dan berusaha untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang masalah stunting ini dengan cara memberikan makanan tambahan, hidup dan pola sehat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi penanganan stunting di Desa Oelami Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (a) Kepatuhan. Kepatuhan merupakan suatu kondisi yang tercipta dan berbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan, Keteraturan yang diberikan dari pemerintah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan dan melaksanakan aturan tersebut. (b) Lancar pelaksana rutinitas fungsi. Keberhasilan Implementasi berhasil dilaksanakan ketika seluruh kegiatan atau rutinitas berjalan dengan lancar. Dengan demikian lancar rutinitas fungsi yang terjadi di Desa Oelami merupakan peran dan fungsi yang dijalankan oleh pemerintah desa dan petugas kesehatan untuk mencegah terjadinya penanganan stunting di Desa Oelami. (c) Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Kinerja berkaitan dengan prestasi yang telah dihasilkan dengan sesuai standar yang ada atau yang telah ditetapkan, dan telah memberikan kepuasan kepada pihak yang terlibat. Peran pemerintah desa, perangkat desa, dan petugas kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tentang dampak yang dirasakan oleh masyarakat di desa oelami berkaitan dengan pencegahan penanganan stunting adalah meningkatkan pengetahuan namun masih perlu adanya pendampingan lebih lanjut Dari petugas kesehatan dan juga komitmen bersama mengingat

perubahan yang dihasilkan tidak terlalu signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Yunus. (2012). *Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan Karakter*. Bandung: Refika Aditama
- Agustino, L. 2017. *Dasar-Dasar kebijakan Publik*. CV Alfabeta : Bandung
- Agustino, Leo.2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV Afabeta: Bandung.
- Agustino, Leo.2008.*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Amran Razak. 2000. *Permintaan Pelayanan Masyarakat Pesisir*. Kalanria Pustaka.
- Apriluana, G., & Fikawati, S. (2018). Analisis Faktor-Faktor Risiko Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita (0-59 bulan) di Negara berkembang dan Asia Tenggara. *Media Penelitian dan pengembangan kesehatan* 28(4), 247-256. <https://doi.org/10.22435/mpk.v28.IV.472>
- Arifin Tahir.2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.PT Pustaka Indonesia Press: Jakarta.
- Arikunto, Suharsimin.1993. *Prosedur Penelitian*.Rianeka. Jakarta
- Ayuningtyas, Dumilah. 2014. *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Azwar, 1996.*pelayanan kesehatan*,pustaka Sinar Harapan, PT. RinekeCipta : Jakarta.
- Donabedian.1999. *Kualitas Pelayanan Kesehatan. Buku Kedokteran. Jakarta*
- Edwar N Gladen dalam RiantNugroho.2012.Public Policy. PT Elex Media Komputindo (Kompas Gramedia): Jakarta.
- Edward III, George C.1980. *Inplementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quartely Press.
- Edwards III, G.C.1980. *Implementing Public Policy*. Congressional QuarterlyPress: Washington.
- Grindle, M.S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princeton University Press: New Jersey.
- H. Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung
- H.B.Sutopo.2002.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.UNS Press:Surakarta. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kepala-bkkbn-indikator-penurunan-stunting-jadi-salah-saluparameter-keberhasilan-kepala-daerah>. Diakses pada Tanggal 09 November 2022, Pada Pukul 08:21 WITA).
- <https://pendidikan.co.id/implementasi-adalah/>. Diakses pada tanggal 10 November 2022 Pukul 15:32 WITA).
- <https://ttukab.go.id/berita/berita-kabupaten/643-rembuk-stunting-wujudkan-generasi-generasi-timor->

- tengah-utara-bebas-stunting.
Diakses pada tanggal 23 Oktober 2022, pada Pukul 09:45 WITA).
<https://www.kemekopmk.go.id/pemerintah-siapkan-langkah-penanganan-stunting-di-provinsi-ntt>. Diakses pada Tanggal 26 Oktober 2022, Pada Pukul 09:22 WITA).
- Islamy Irfan.2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara: Jakarta.
- Maryah Sukarni. 1994. *Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Lingkungan*. Kansius. Yogyakarta.
- Mulyani, Deddy. 2015. *Study Kebijakan public dan Pelayanan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Ni”mah Koirun, & Nadhiro, S.R.(2015). Faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita. *Media gizi Indonesia*
- Oktasari.2015. Teori Implementasi Kebijakan. (*Jurnal Universitas Medan Area*)
- Peraturan pemerintah(PP) No. 33/2012 tentang Asi Eksklusif
- Peraturan presiden(perpres) No.42/2013 tentang Gerakan Nasional percepatan perbaikan gizi
- Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI). 2018. *Stop Stunting dengan Konseling Gizi*. Penebar Plus: Jakarta.
- Priyono, P. (2020) Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (studi kasus) pendampingan aksi cegah stunting di desa. *Jurnal good governance*. <https://doi.Org/10.32834/gg.V16ii2198>.
- Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI. 2018. *Situasi Balita Pendek (stunting) di Indonesia*. Pusat Data dan Informasi: Jakarta
- Putra, Fadilah. 2003 Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik: perubahan dan inovasi kebijakan Public Dalam Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ranadireksa, Hendarmin. 2007. *ARSITEKTUR KONSTITUSI DEMOKRATIK*. Fokus Media: Bandung.
- Ripley, Randall B. dan Franklin, Grace A. (1986) *Polici Implemntation and Bureaaucracy*. Chicago: The Dorsey Press
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Fraklin. 1986. *Policy Implementation and Bureauracy, second edition, the Dorsey Press*, Chicago-Illionis.
- Ripley. Renda B. and George A. Fraklin. 1986. *Policy Implementasion and Bureaucrary, second edition, the Dorsey Press*. Chicago-Illionis.
- Sinonim, 1999. *Menuju Indonesia Sehat 2010*. Departamen Kesehatan RI. Jakarta
- Sugiyono . 2018 . *Metode Penelitian Kualitatif*. CV alfabeta : Bandung
- Suharto Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Reflika Aditama: Jakarta.
- Undang-undang No. 36/2009 tentang kesehatan
- Waryono.2010. *Gizi Reproduksi*. Pustaka Rihana: Yogyakarta.
- WHO.2018. *Haemoglobin concetrations for the*

*diagnosis of assessment of
severity.*

WHO/NMH/NHD/MNM/11.

1.